

INTEGRASI BANGSA

Sayidiman Suryohadiprojo*)

Sejak ada reformasi di Indonesia telah mencuat berbagai persoalan yang bersangkutan dengan disintegrasi bangsa. Sebenarnya disintegrasi bangsa bukan ditimbulkan oleh reformasi sebab jauh sebelumnya sudah ada indikasinya. Akan tetapi setelah ada reformasi ada kesempatan bagi mereka yang bermaksud menimbulkan disintegrasi bangsa untuk menunjukkan pendiriannya dan aktivitasnya secara terbuka.

Melihat bahaya yang ditimbulkan disintegrasi kepada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, maka perlu ada usaha yang kuat dan terarah dari semua pihak yang mencintai negara ini, untuk mengatasinya. Atau dengan perkataan lain, perlu ada gerakan untuk menciptakan kembali integrasi bangsa. Gerakan itu tentu harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik yang di pusat maupun di daerah. Akan tetapi tidak cukup hanya merupakan gerakan pemerintah. Harus pula diusahakan agar semua pencinta Republik Indonesia ikut serta dalam gerakan itu, sehingga gerakan itu mempunyai kekuatan nyata seperti ketika rakyat Indonesia melakukan pergerakan dan perjuangan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.

Disintegrasi Bangsa

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisa persoalan disintegrasi nasional yang sedang terjadi dan mencari jalan untuk mengatasinya. Selain itu juga hendak diajukan saran bagaimana mewujudkan integrasi bangsa yang dapat memberikan hasil nyata sehingga kelangsungan hidup Republik Indonesia terjamin sepanjang zaman.

Sejak terjadi reformasi yang memberikan kesempatan bagi se-

mua pihak di Indonesia untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, terjadi perkembangan yang amat baik bagi masa depan kehidupan rakyat pada umumnya. Akan tetapi di pihak lain juga ada dampak yang bersifat kurang baik bagi bangsa kita, yaitu ketika muncul berbagai pernyataan dan usaha yang mengarah kepada perpecahan antara rakyat Indonesia, khususnya yang terjadi di daerah yang bersifat perlawanan kepada Repu-

*) *Mantan Dubes Keliling RI untuk Afrika, mantan dubes Jepang, dan penulis berbagai artikel tentang masalah hankam.*

blik Indonesia dan gejala hendak memisahkan diri.

Pertama adalah persoalan Aceh yang merupakan pertentangan antara Aceh dan pemerintah pusat atau bahkan Republik Indonesia pada umumnya. Persoalan Aceh ini sebenarnya sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dan tidak dapat diselesaikan secara memuaskan oleh pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie maupun Presiden Abdurrahman Wahid. Rakyat Aceh merasa tidak puas atas sikap dan perlakuan pemerintah pusat terhadap daerahnya dan para pemimpinnya. Rakyat Aceh merasa telah memainkan peran khusus dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya ketika daerahnya menjadi tempat Pemerintah Darurat RI untuk menggantikan peran pemerintah pusat di Yogyakarta yang bagian terbesar ditawan Belanda dalam Perang Kemerdekaan Kedua. Peran Aceh menonjol karena perjuangan rakyat Aceh yang gigih melawan penjajah Belanda, sehingga Belanda tidak mampu mengirimkan pasukannya guna menduduki ibukota dan daerah Aceh. Hal ini berbeda sekali dengan daerah lain Indonesia yang umumnya mengalami pendudukan oleh tentara Belanda, paling tidak kota-kota yang ada di daerah itu.

Demikian pula usaha rakyat Aceh untuk mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk membeli pesawat terbang bagi keperluan perjuangan RI dan menjadi landasan berdirinya maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia kemudian.

Rakyat Aceh merasa diperlakukan tidak adil semenjak pemerintahan Presiden Soekarno ketika status Aceh sebagai Daerah Istimewa dihapuskan dan bahkan pemimpinnya, yaitu Tengku Daud Beureuh, diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur Militer dan dipindahkan ke Jakarta tanpa status dan kantor yang jelas. Kemudian rasa tidak puas itu bertambah lagi ketika dalam masa Orde Baru sumbangan daerahnya kepada pembangunan dan produksi nasional berupa hasil minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lainnya tidak memperoleh imbalan yang sepadan. Tidak ada peningkatan pembangunan daerah dan rakyat Aceh yang menonjol, sehingga rakyat beranggapan bahwa kekayaan Aceh lebih dimanfaatkan pusat (dan Jawa) daripada untuk kepentingan kemajuan Aceh sendiri. Semua rasa tidak puas itu menumpuk menjadi persoalan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat, baik semasa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto sampai sekarang.

Persoalan Irian Jaya merupakan persoalan disintegrasi bangsa kedua yang juga sudah lama ada dan tidak kalah menonjolnya dari Aceh. Juga di Irian Jaya ada rasa ketidakpuasan yang kuat terhadap pemerintah pusat. Hal ini terutama ditimbulkan oleh anggapan sementara rakyat Irian bahwa kekayaan alam Irian Jaya lebih banyak dimanfaatkan untuk memperkaya pemerintah pusat dan kurang ada perhatian terhadap pembangunan daerah dan rakyat Irian Jaya. Perasaan rakyat Irian itu secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh eksistensi negara Papua Nugini. Tidak mustahil ada sementara orang Irian Jaya berpikir mengapa saudaranya yang satu etnik dapat berdiri merdeka sedangkan ia sendiri tidak. Tidak pula mustahil bahwa ada pengaruh dari luar negeri yang memanasi pikiran dan perasaan orang Irian Jaya.

Baik di Aceh maupun di Irian Jaya timbul gerakan dari sementara rakyatnya untuk mewujudkan kemerdekaan bagi daerahnya dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat mengajak sementara rakyat Aceh untuk mencapai tujuannya dan bahkan dapat memperoleh bantuan terbatas dari pihak luar negeri tertentu. Demikian pula Organisasi Papua Merdeka

(OPM) yang dibentuk sementara orang Irian Jaya didukung oleh kalangan terbatas rakyat Irian Jaya serta pihak tertentu di luar negeri.

Rasa ketidakpuasan juga terjadi di Riau di mana sementara pihak menghendaki kemerdekaan daerah itu. Juga rasa ketidakpuasan rakyat Riau timbul karena ada anggapan bahwa sumbangan Riau kepada ekonomi nasional berupa produksi minyak yang banyak tidak diimbangi oleh usaha pusat mewujudkan pembangunan daerah Riau yang sepadan. Namun skala persoalan Riau belum segawat Aceh dan Irian Jaya.

Selain persoalan disintegrasi terjadi karena ketidakpuasan rakyat daerah terhadap pemerintah pusat RI, juga timbul persoalan yang bersangkutan dengan konflik antara etnik. Hal itu terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ketika rakyat yang tergolong etnik Dayak menyerang dan bahkan membunuh rakyat dari etnik Madura. Di Aceh dan Irian juga ada persoalan etnik, demikian pula di Maluku. Di Aceh kegusaran terhadap pemerintah pusat berakibat timbulnya kebencian terhadap etnik Jawa, karena ada anggapan bahwa pemerintah pusat dikuasai etnik Jawa dan pembangunan nasional lebih ditujukan untuk pulau Jawa. Tim-

bul desakan rakyat agar mereka yang etnik Jawa yang semula datang di Aceh sebagai transmigran keluar dari daerah itu. Timbul anggapan bahwa Jawa telah menjadi penjajah menggantikan peran penjajah Belanda. Di Irian pun ada perasaan serupa terhadap Jawa, tetapi lebih kuat lagi adalah penolakan terhadap etnik Bugis dan Buton. Demikian pula di Maluku ada penolakan terhadap dua golongan etnik ini. Penolakan terhadap etnik Madura di Kalimantan, etnik Bugis dan Buton di Maluku dan Irian Jaya ada latar belakang ekonomi, sekalipun hal ini tidak diakui oleh rakyat daerah itu. Etnik Madura di Kalimantan, demikian pula etnik Bugis dan Buton di Irian Jaya dan Maluku sebagai kelompok pendatang mempunyai vitalitas ekonomi yang lebih besar dibandingkan rakyat asli daerah. Dengan begitu pendatang itu memperoleh status ekonomi yang oleh rakyat asli daerah dirasakan lebih menguasai ekonomi daerah itu. Hal ini sesungguhnya mirip sekali dengan sentimen rakyat Indonesia pada umumnya terhadap penduduk nonpribumi yang dianggap menguasai ekonomi nasional. Kondisi itu pun telah menimbulkan banyak persoalan dan kerugian bagi Republik Indonesia, termasuk dalam pandangan dunia internasional. Sebab pertentangan

antar-etnik tersebut disertai tindakan yang amat kejam di luar perikemanusiaan, selain diadakan perusakan dan perampokan.

Persoalan disintegrasi bangsa dipertajam lagi oleh pertentangan agama Islam dan Kristen serta Katolik yang kemudian terjadi di Maluku dan Kalimantan. etnik Madura, Bugis dan Buton pada umumnya pemeluk Islam yang kuat, sedangkan penduduk asli di Maluku dan Kalimantan lebih banyak beragama Kristen atau Katolik. Maka persoalan etnik yang semula dipicu oleh faktor ekonomi menjadi lebih parah karena faktor agama. Setelah rakyat Bugis dan Buton diungsikan dari Maluku, konflik agama yang keras malahan terjadi antara rakyat Maluku sendiri, yaitu yang Kristen dan Katolik di satu pihak terhadap yang Islam di pihak lain. Konflik agama ini kemudian menjalar ke Sulawesi Tengah yang membangkitkan konflik antara penduduk daerah itu, yang Islam di satu pihak dengan yang Kristen dan Katolik di pihak lain. Juga di Kalimantan pertentangan etnik Dayak-Madura dipertajam oleh pertentangan agama Kristen-Islam. Pertentangan agama ini menimbulkan lebih banyak lagi kekejaman dan pelanggaran hak azasi manusia.

Pulau Jawa pun tidak bebas dari persoalan disintegrasi bang-

sa. Hal itu terjadi ketika pengikut Presiden Abdurrahman Wahid beranggapan bahwa pemimpin mereka diperlakukan tidak semestinya oleh lawan-lawan politiknya, padahal di mata mereka A. Wahid adalah seorang wali yang tidak mungkin berbuat salah. Sikap demikian tidak perlu menimbulkan kekhawatiran andai kata tidak dinyatakan dengan penggunaan kekerasan. Ini terutama terjadi di Jawa Timur yang sudah membuktikan tindakan kekerasan dan perusakan oleh pengikut Wahid terhadap rakyat yang mereka anggap musuh yang merugikan Wahid. Yang dianggap musuh adalah mereka yang menjadi anggota Muhammadiyah dan partai politik yang dinilai berseberangan dengan Wahid, seperti PAN, Golkar, PPP. Hingga saat ini rakyat yang diperlakukan dengan cara kekerasan oleh pengikut Wahid tidak melakukan perlawanan sekalipun kekerasan dan perusakan sangat merugikan mereka. Akan tetapi kalau tindakan pengikut Wahid menjadi lebih keras dan meluas, belum tentu rakyat yang menjadi korban tindakan mereka akan terus saja diam tanpa melawan. Ada kekhawatiran bahwa tindakan pengikut Wahid akan lebih mengeras dan meluas apabila pada bulan Agustus 2001 Sidang Istimewa MPR memutus-

kan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI atau mengenakan *impeachment* terhadapnya. Kalau itu terjadi hampir pasti pengikut Wahid, terutama di Jawa Timur, akan melakukan tindakan melawan keputusan itu. Besar kemungkinan bahwa tindakan itu berupa kekerasan dan perusakan, baik terhadap lembaga pemerintah maupun terhadap rakyat yang oleh pengikut Wahid dianggap musuhnya.

Presiden A. Wahid sendiri tidak membantu untuk mengurangi kegawatan disintegrasi itu. Bahkan secara ironis presiden berkali-kali menyatakan ancaman bahwa ada daerah-daerah yang akan memerdekakan diri kalau ia diberhentikan sebagai presiden, antara lain Jawa Timur, Aceh, Irian Jaya dan Riau. Akan tetapi hal itu dibantah oleh banyak pemimpin dan rakyat daerah itu. Memang bagian terbesar rakyat daerah-daerah itu tidak menghendaki pemisahan dari Republik Indonesia, melainkan ingin mendapat perhatian dan perlakuan yang adil. Hanya satu dua orang saja yang berpikir tentang pemisahan daerahnya dari RI.

Selain itu Presiden Wahid seakan-akan memperkuat sikap pengikutnya untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan, dengan selalu menyatakan bah-

wa DPR dan MPR akan diserbu rakyat karena dinilai merugikan kepentingan rakyat.

Melihat gambaran ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menghadapi persoalan disintegrasi bangsa yang amat akut. Bahkan dapat dikatakan bahwa kelangsungan hidup Republik Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan proses disintegrasi itu. Apakah bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan disintegrasi ini secara memuaskan.

Indonesia sebagai Masyarakat Majemuk

Adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan satu masyarakat yang amat majemuk. Di Indonesia terdapat sekian banyak suku bangsa, masing-masing dengan kebudayaannya dan bahasanya sendiri. Rakyat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, sekalipun lebih dari 85 persen pemeluk Islam. Boleh dikatakan bahwa semua agama dunia mempunyai pemeluknya di Indonesia, baik Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Confucius serta cabang-cabang dari agama-agama itu. Kemajemukan itu diperkuat lagi oleh faktor geografi. Rakyat Indonesia menghuni wilayah kepulauan yang dapat dinamakan satu benua ma-

ritim yang besar. Di dalamnya ada pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Irian, tetapi juga banyak yang kecil yang tersebar sepanjang khatulistiwa. Dikatakan bahwa jumlah pulau Indonesia tidak kurang dari 13.700.

Kemajemukan bangsa Indonesia membuat sementara pakar ilmu pengetahuan sosial Barat mengatakan pada tahun 1945, bahwa mustahil ada bangsa Indonesia dan terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa atau *nation state*. Mereka katakan waktu itu bahwa adanya usaha bersatu antara rakyat Indonesia dimungkinkan selama ada penjajah Belanda. Penjajahan mempersatukan rakyat Indonesia karena semua mengalami satu nasib satu penanggungan dan karena itu ada satu sasaran bagi semua untuk diatasi, yaitu mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia. Akan tetapi kalau penjajah Belanda sudah tidak ada, usaha bersatu itu akan ambyar seperti pasir kering, begitu kata pakar Barat itu. Mereka katakan bahwa pengertian Indonesia amat artifisial. Yang ada atau riil adalah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Riau, Jambi dan semua suku lainnya dengan budaya dan bahasanya sendiri.

Namun bangsa Indonesia telah membuktikan ketidakbenaran prediksi atau pengamatan

pakar Barat itu. Sebab terbukti bahwa setelah tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dan kemudian keluar dari bumi Indonesia, Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945 dapat hidup dan berkembang hingga sekarang. Memang Republik Indonesia mengalami banyak sekali ujian, tantangan dan bahkan ancaman yang semuanya tertuju kepada kelangsungan eksistensinya, namun RI tetap eksis dan hidup langsung.

Pergerakan nasional Indonesia bersumber pada bangsa yang majemuk itu. Setiap daerah Indonesia yang dikuasai dan dijajah Belanda mengalami penderitaan yang oleh rakyat dirasakan tidak adil. Akan tetapi setiap usaha untuk melawan penjajah selalu dapat ditindas dengan kekerasan oleh penjajah. Namun pada permulaan abad ke-19 terjadi perubahan besar dalam pandangan rakyat Asia yang umumnya dijajah bangsa Eropa. Meskipun berbagai usaha perlawanan sebelumnya selalu dapat dikalahkan oleh penjajah, namun kaum muda mulai sadar bahwa harus diusahakan untuk lepas dari penjajahan itu. Perkembangan itu juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 1904 terjadi perang antara Jepang, satu bangsa Asia, dengan Rusia yang

waktu itu sudah termasuk kekuatan utama antara negara-negara Barat. Tidak disangka sebelumnya bahwa perang itu dapat dimenangkan oleh Jepang melalui pertempuran darat dan laut yang cukup mengagumkan, dan peristiwa itu menambah semangat pemuda Asia untuk bangkit melawan penjajahan. Terbukti tidak benar bahwa orang Asia selalu kalah dari orang Eropa dan Barat lainnya.

Maka di Indonesia pemuda membentuk gabungan atau persatuan di daerahnya, seperti yang kemudian kita kenal dengan perkumpulan *Jong Java*, *Jong Sumatra*, *Jong Ambon* dan lainnya. Namun kemudian para pemuda di Indonesia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan akan lebih efektif kalau mereka bergabung menjadi satu untuk seluruh Indonesia. Dalam pada itu sebutan *Indonesia* ditemukan yang semula digunakan oleh seorang etnolog Inggris, *G.R. Logan*, pada tahun 1850, ketika ia menulis buku mengenai bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah. Logan menggabungkan kata *India* yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang Barat sebagai daerah penghasil rempah dengan kata *nesos* yang berarti kepulauan. Gabungan dua kata itu menghasilkan sebutan *Indonesia*. Maka pada tanggal 28

Oktober 1929 para pemimpin pemuda seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta yang masih bernama *Batavia* sebagai ibukota daerah jajahan Belanda Hindia Belanda. Mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang menyatakan Sumpah Pemuda, yaitu *Mengaku Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia*. Alasan mereka menyatakan Sumpah Pemuda itu karena kemauan untuk bersatu lebih kuat dari adanya rintangan yang diakibatkan kemajemukan, seperti sejarah, bahasa, hukum adat dan lainnya.

Sejak Sumpah Pemuda itu pergerakan nasional makin kuat dan meluas dan akhirnya menghasilkan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan terbentuknya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pemimpin perjuangan kemerdekaan di bawah pimpinan Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta memutuskan bahwa Republik Indonesia satu negara kesatuan, bukan negara federal. Alasan mereka adalah bahwa untuk kepentingan perkembangan Indonesia yang pesat segala kemampuan, khususnya yang menyangkut keahlian, harus dipusatkan. Apabila dibentuk negara federal, dengan setiap daerah menjadi negara bagian, diperkirakan bahwa keahlian bangsa Indonesia yang masih

sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun jenis, disebabkan oleh politik penjajahan Belanda yang kurang memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berkembang melalui pendidikan dan lainnya, akan terlalu tersebar dan tercecer di setiap daerah. Demikian kuat rasa persatuan bangsa waktu itu.

Namun demikian, para pendiri Republik Indonesia menyadari juga bahwa Indonesia adalah penuh kemajemukan. Hal itu mereka jadikan Simbol negara yang bunyinya *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu perbedaan dalam persatuan. Sebab itu mereka katakan bahwa sekalipun Republik Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan, namun harus diberikan otonomi yang luas kepada daerah agar dapat berkembang sesuai kondisinya. Sebenarnya kemajemukan tidak hanya mengandung faktor negatif. Ia juga mengandung faktor positif apabila bangsa Indonesia mampu dan cakap mengambil manfaat dari keunggulan setiap unsur Indonesia bagi kepentingan seluruh bangsa. Pasti setiap unsur yang mempunyai perbedaan satu sama lain mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kalau dapat dilakukan pengelolaan yang baik sehingga faktor kelemahan disisihkan, maka kemajemukan justru akan menghasil-

kan kekuatan nasional yang lebih besar dari pada homogenitas. Itu akan terjadi apabila dapat diwujudkan sinergi dari faktor kekuatan yang terkandung dalam semua unsur, yaitu adanya harmonisasi dari semua unsur yang mempunyai perbedaan.

Perkembangan bangsa Indonesia dalam tahun-tahun permulaan kemerdekaannya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu mengatasi faktor negatif dari kemajemukan. Dalam sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 acap kali bangsa Indonesia mendapat pujian dari dunia luar dalam kemampuannya mengatasi masalah kemajemukan itu. Negara-negara lain di dunia amat sukar mengatasi kemajemukan dan selalu mengalami persoalan yang sengit apabila harus mengatasi perbedaan agama. Banyak negara Eropa Barat, termasuk Inggris, Jerman, Belanda, sekalipun sudah menjadi negara maju dan sejahtera tetap saja sukar mengatasi persoalan di kalangan penduduknya yang berbeda agama, yaitu Kristen dan Katolik. Di Indonesia terbukti bahwa sampai tahun 1950-an kerukunan antara umat beragama dapat terpelihara. Pada waktu itu menjadi kebanggaan orang Indonesia apabila berbicara dengan orang asing, betapa di Indonesia begitu banyak contoh kerukunan umat

beragama, seperti jelas sekali dalam hubungan rakyat Tapanuli yang Kristen dan Islam. Demikian pula orang asing sempat kagum betapa Indonesia dapat membuat satu bahasa nasional di samping sekian banyak bahasa daerah. Dan bahasa nasional itu tidak diambil dari bahasa suku bangsa Jawa yang merupakan mayoritas besar di antara rakyat Indonesia. Yang dipilih sebagai bahasa nasional adalah bahasa Melayu yang merupakan bahasanya etnik yang kecil jumlahnya tetapi bahasa itu telah berkembang menjadi satu *lingua franca* di seluruh wilayah pantai Indonesia. Pendeknya, Indonesia yang satu dan utuh menjadi pengertian yang nyata yang amat menimbulkan kebanggaan, terutama bagi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun sayang sekali bahwa segala kebanggaan itu kemudian langkah demi langkah menghilang. Sampai akhirnya yang kita lihat adalah disintegrasi bangsa yang sekarang kita alami. Kemunduran yang amat disayangkan itu disebabkan oleh manajemen nasional yang banyak mengandung kelemahan dan kekurangan.

Manajemen Nasional yang Mengakibatkan Disintegrasi

Kelemahan pertama dan utama dalam manajemen nasional adalah ketidakmampuan para pemimpin Indonesia untuk menjadikan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara, berkembang sebagai realitas yang hidup dalam kehidupan bangsa.

Presiden Soekarno sebagai penggagas Pancasila dan presiden RI yang pertama tidak berhasil menjadikan nilai-nilai yang dikandung Pancasila kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Malahan sebaliknya. Bung Karno memperkenalkan konsep politik demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Memang Pancasila menghendaki demokrasi sebagai sistem politik, tetapi demokrasi terpimpin sama sekali tidak mewujudkan demokrasi dan lebih bersifat otoriter. Bung Karno juga mengabaikan perlunya perbaikan hidup bangsa yang mendatangkan keadilan sosial yang sejahtera. Meskipun Bung Karno selalu bicara tentang Persatuan Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya yang sentralistis sama sekali tidak memperhatikan kepentingan daerah. Demikian pula Presiden Soeharto mendiskreditkan Pancasila ketika melakukan banyak

usaha yang diberi label Pancasila, seperti demokrasi Pancasila dan penataran Pancasila, tetapi dalam kenyataan yang dilakukan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ini semua menjadi sumber makin menonjolnya faktor negatif dari kemajemukan.

Pada saat berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945 para pendiri negara telah mewantiwanti bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan. Akan tetapi mengingat banyaknya keragaman pada rakyat Indonesia harus ada otonomi yang luas pada setiap daerah dan harus ada desentralisasi. Dengan begitu semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika akan terwujud dengan baik.

Namun sayang sekali bahwa amanat ini tidak pernah dilaksanakan oleh para penguasa RI sejak 1945 hingga belakangan ini. Tidak pernah ada desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dan RI selalu dikendalikan secara sentral atau terpusat. Ketika penjajah Belanda menggunakan konsep federalisme untuk melawan perjuangan RI dan membentuk negara di setiap daerah yang dikuasai pasukannya, maka hal ini justru menguatkan sikap dan paham sentralisme di kalangan RI. Apalagi gaya kepemimpinan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama RI memang lebih

menyukai sentralisme, bahkan segala kekuasaan memusat kepada dirinya. Hal itu terlihat jelas dalam konsep demokrasi ter-pimpin yang beliau laksanakan setelah UUD 1945 diberlakukan kembali sejak Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958 yang meliputi daerah luas di Sumatera dan Sulawesi dengan alasan bahwa Pemerintah RI kurang memperhatikan kepentingan daerah, tidak menimbulkan kesadaran pada Presiden Soekarno betapa bahayanya penggunaan konsep sentralisme dalam memimpin RI. Mungkin hal itu juga disebabkan karena TNI berhasil mengatasi pemberontakan PRRI/Permesta dengan relatif cepat. Selain itu juga mungkin telah timbul anggapan yang salah bahwa rakyat Indonesia senang dan setuju dengan Republik Indonesia sebagaimana adanya. Hal itu terbukti ketika Republik Indonesia Serikat hasil Konferensi Meja Bundar dengan Belanda dalam waktu setengah tahun sudah beralih menjadi Republik Indonesia. Dalam Republik Indonesia Serikat yang bersifat negara federal Republik Indonesia hanya merupakan negara bagian, sebagaimana negara-negara bagian lainnya semuanya bentukan Belanda. Namun pada 17 Agustus 1950, hanya 8 bulan setelah

RIS berfungsi, seluruh rakyat yang tinggal di semua negara bagian bentukan Belanda telah secara resmi menghendaki untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Dengan begitu RIS hasil KMB dengan Belanda serta semua negara bagian bentukan Belanda berakhir eksistensinya tanpa ada letusan peluru satu pun. Hal itu mungkin membuat Bung Karno dan para pemimpin lainnya takabur. Terwujud gambaran yang salah pada para pemimpin RI, termasuk Bung Karno, bahwa rakyat Indonesia menghendaki Republik Indonesia sebagaimana adanya, yaitu dengan pengelolaan yang sentralistis. Padahal makin terjadi perkembangan RI makin rakyat daerah merasakan bahwa kepentingan daerahnya kurang menjadi perhatian Pemerintah pusat. Daerah dengan kekayaan alamnya yang jauh lebih banyak dan lebih besar dari Jawa, memberikan sumbangan besar kepada terbentuknya produksi nasional. Akan tetapi manajemen nasional yang sentralistis tidak memberikan imbalan yang sewajarnya kepada daerah yang banyak memberikan sumbangan itu.

Ketika kesadaran itu terwujud pada rakyat daerah, maka faktor obyektif berupa perbedaan budaya, hukum adat dan lainnya mulai menimbulkan te-

kanan kepada rasa persatuan Indonesia. Makin menguat rasa kurang puas rakyat daerah akan nasibnya yang selalu tertinggal dari Jawa dalam segala aspek kehidupan.

Ketika pemerintahan Presiden Soeharto mulai dengan pembangunan nasional yang bertitik berat pembangunan ekonomi, rasa ketidakpuasan itu makin menguat. Sebab pembangunan ekonomi yang dipimpin kaum teknokrat justru memperkuat sentralisme dengan alasan efisiensi. Pembangunan ekonomi dikendalikan secara terpusat di Jakarta oleh para teknokrat dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang dalam retorika dikatakan bahwa di samping pertumbuhan ekonomi ada faktor pemerataan dan stabilitas nasional yang harus diperhatikan; mereka sebut itu Trilogi Pembangunan. Namun dalam kenyataan yang diutamakan kaum teknokrat adalah mencapai pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan diabaikan. Mereka mengatakan bahwa tindakan mereka didasarkan rasionalitas untuk mewujudkan efisiensi tertinggi. Dan untuk mencapai efisiensi harus ada sentralisme dalam pengambilan keputusan. Akibatnya adalah bahwa kegiatan pembangunan lebih banyak terjadi di Jawa yang menyerap bagian terbesar in-

vestasi modal asing. Oleh karena segala keputusan diambil di Jakarta maka pemodal asing tidak mau ambil risiko dengan melakukan penanaman modal jauh dari pusat. Kecuali yang menyangkut investasi dalam pertambangan, dan perolehan yang terwujud dari investasi itu bagian terbesar masuk dalam kas pemerintah pusat.

Andaikata dalam kebijaksanaan ekonomi para teknokrat yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi ada perhatian yang cukup untuk bangkitnya ekonomi kecil dan menengah, baik yang berupa koperasi atau swasta, dan itu dilakukan di seluruh Indonesia, mungkin dampak negatif dari manajemen ekonomi nasional tidak terlalu merugikan persatuan bangsa. Akan tetapi manajemen nasional amat menterlantarkan pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah, sekalipun dalam retorika selalu dikatakan pentingnya koperasi dan tumbuhnya ekonomi rakyat.

Maka rakyat daerah yang melihat kekayaan buminya diambil orang asing, tetapi tidak turut merasakan hasil dari perolehannya makin tidak puas kepada pusat. Sebagaimana pernah dinyatakan seorang rektor universitas di Kalimantan Timur pada tahun 1980-an: daerah Kalimantan Timur banyak sekali

sumbangannya kepada GDP Indonesia melalui hasil pengolahan minyak, gas alam, batu bara, kayu dan lainnya. Akan tetapi mutu pendidikan di Kalimantan Timur tidak pernah meningkat. Buktinya, tidak pernah lulusan SMU di Kaltim dapat diterima di universitas negeri di Jawa, demikian katanya. Perasaan serupa timbul di Aceh, Riau, Irian.

Malahan rasa ketidakpuasan tidak hanya timbul di daerah luar Jawa yang kurang memperoleh perhatian dalam pembangunan. Di Jawa sendiri tumbuh rasa tidak puas secara meluas karena politik ekonomi yang ditempuh Pemerintah Soeharto dengan mengutamakan modal besar dan konglomerasi itu. Alasan yang diberikan kaum teknokrat bahwa hasil pembangunan yang mengutamakan modal besar akan secara otomatis menurun kepada rakyat lainnya yang lazim dikenal dengan *trickle down effect*, ternyata tidak menjadi kenyataan. Justru yang timbul adalah makin lebarnya perbedaan antara mereka yang kaya yang menjadi makin kaya dengan rakyat yang miskin dan bertambah pula miskin. Yang kaya dapat dikategorikan sama dengan orang kaya di negara maju, sedangkan yang miskin tetap sengsara.

Karena pemilik modal besar umumnya adalah dari golongan

nonpribumi keturunan Cina, maka timbul ketidakpuasan terhadap dominasi ekonomi nasional oleh etnik Cina yang hanya merupakan sekitar 5 persen dari penduduk Indonesia. Akan tetapi para pengelola ekonomi nasional tidak menghiraukan perkembangan demikian. Mereka anggap tidak bisa lain karena pertumbuhan ekonomi memerlukan efisiensi dan mereka yang efisien sewajarnya memegang dominasi atas ekonomi. Para pengelola ekonomi tidak menyadari bahwa manajemen ekonomi nasional yang mereka lakukan meletakkan benih bagi perpecahan bangsa yang amat berbahaya. Selama pemerintahannya, Presiden Soeharto dapat meredam segala ketidakpuasan dengan kekuasaan serta kekerasan, sehingga segala ketidakpuasan itu tidak meledak tetapi tersimpan. Ketika kekuasaan itu tidak ada lagi ketidakpuasan yang menumpuk itu meledak seperti yang sekarang kita rasakan.

Manajemen nasional juga mempunyai kelemahan mendasar dalam bidang politik. Meskipun Presiden Soeharto selalu mengatakan bahwa dasar negara adalah Pancasila dan diadakan usaha luas untuk melakukan penataran Pancasila, namun dalam kenyataan nilai-nilai Pancasila tidak diwujudkan. Hal itu sudah terbukti dalam manaje-

men ekonomi nasional yang sama sekali tidak menghiraukan sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Juga dalam politik tidak ada realisasi dari sila Kerakyatan, sila Persatuan Indonesia dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahkan sebaliknya yang terjadi. sekalipun sistem politik Orde Baru menamakan diri Demokrasi Pancasila. Katanya arti Orde Baru adalah tatanan yang melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara sungguh-sungguh dan konsekuen. Namun dalam kenyataan Orde Baru membungkam kebebasan berpendapat bagi rakyat dan tidak ada kemerdekaan berorganisasi. Yang lebih merusak lagi adalah bahwa pelanggaran sedikit saja terhadap penjagaan stabilitas nasional, dihukum dengan cara yang penuh kekerasan. Maka yang timbul adalah ketakutan yang kemudian berubah menjadi keberingasan setelah kekuasaan tidak ada lagi.

Manajemen nasional yang salah dalam politik ini lebih menonjol dengan pelaksanaan karya atau penugasan anggota ABRI di lingkungan pemerintahan, terutama di lingkungan pemerintahan di pusat maupun daerah. Andai kata Dwi Fungsi ABRI tidak diwujudkan dengan melaksanakan karya secara luas dan dirasakan efektifitas-

nya, mungkin sekali tidak menimbulkan dampak negatif. Akan tetapi karena karya dirasakan oleh banyak kalangan sipil sebagai perbuatan yang mengambil pekerjaan orang sipil, padahal mereka sukar sekali untuk mendapat pekerjaan, maka timbul ketidakpuasan yang makin kuat. Apalagi kehadiran perwira ABRI di pemerintahan dirasakan memperkuat kekuasaan otoriter yang dilakukan Presiden Soeharto. Rasa ketidakpuasan itu tidak secara langsung berdampak pada persatuan bangsa. Akan tetapi karena kuatnya ketidakpuasan itu, maka makin menguat rasa tidak percaya kepada pemerintahan Presiden Soeharto. Ini secara tidak langsung memperkuat disintegrasi bangsa.

Timbulnya konflik antarumat beragama terjadi terutama karena pemerintah, khususnya Departemen Agama, tidak mampu mewujudkan kondisi yang membuat umat beragama menaati ajaran agamanya masing-masing. Memang sukar sekali bagi umat beragama untuk menghargai agama lain, kecuali bagi rakyat yang sudah terpelajar. Akan tetapi andai kata setiap umat beragama menjalankan ajaran agamanya secara baik, pasti tidak ada pertentangan dan konflik yang begitu keras sehingga menghasilkan penggunaan

kekerasan. Sebab dalam setiap agama diajarkan hal-hal yang baik yang harus diperbuat manusia terhadap manusia lain. Akan tetapi dalam kenyataan hal itu tidak dilakukan karena pemeluk agama yang kurang terpelajar dan kurang luas pandangannya cenderung untuk hanya mengejar kepentingan umatnya sendiri. Memang pada tingkat pimpinan umat dapat dicapai persetujuan dan terwujud kerukunan, sekalipun pada tingkat itupun masih ada kekurangsesuaian pandangan. Namun pada tingkat *grassroot* sukar sekali menimbulkan saling penghargaan dan hormat-menghormati. Kalau dulu orang Indonesia bangga ketika umat Islam membantu umat Kristen apabila membangun gereja dan sebaliknya juga umat Kristen membantu umat Islam membangun mesjid, sekarang umat Kristen dianggap umat Islam membangun gereja pada tempat terlarang dan menimbulkan perbuatan umat Islam untuk merusak atau bahkan membakar gereja itu. Timbul perasaan umum di lingkungan umat Islam bahwa sedang dilakukan usaha Kristenisasi di daerah yang diketahui mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebaliknya di daerah yang dikenal sebagai daerah Kristen ada kecurigaan umat Kristen bahwa ada usaha Islami-

sasi. Apalagi ketika diberitakan bahwa baik di belakang Kristenisasi maupun Islamisasi ada dukungan luar negeri, khususnya berupa modal.

Ini semua tidak dapat diatasi oleh Departemen Agama sehingga sentimen pertentangan makin lama makin menguat. Sekarang Indonesia tidak lagi dikenal di dunia sebagai bangsa dengan kerukunan dan toleransi agama yang dapat dijadikan tauladan bangsa lain. Malahan sekarang Indonesia dicatat sebagai wilayah konflik umat beragama yang paling kuat.

Satu kelemahan besar dalam manajemen nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional yang kurang memperoleh perhatian yang memadai. Tidak saja mutu pendidikan kurang mencapai standard yang sesuai dengan tingkat internasional. Juga pendidikan kurang merata dalam masyarakat. Meskipun ada undang-undang wajib belajar yang menetapkan anak Indonesia harus sekolah selama 9 tahun, yaitu 6 tahun SD dan 3 tahun SLTP, tetapi karena tidak pernah ada anggaran pendidikan yang jumlahnya cukup, maka dalam kenyataan wajib belajar kurang sekali memberikan dampak positif pada perkembangan bangsa. Memang ada sekolah-sekolah yang bermutu, tetapi jumlahnya sangat terbatas

dibandingkan dengan jumlah anak Indonesia. Akibatnya masalah timbul kesenjangan antara anak Indonesia yang mendapat pendidikan sekolah yang baik dengan mereka yang kurang beruntung dengan pendidikannya, dan yang terakhir ini justru jauh lebih besar jumlahnya dan kebanyakan ada di daerah luar Jawa. Sehingga manajemen pendidikan nasional yang sembarangan ini turut menimbulkan disintegrasi bangsa. Bagaimana mau melakukan pendidikan secara baik kalau pemerintah RI selama bangsa Indonesia merdeka belum pernah memberikan anggaran pendidikan melebihi 10 persen APBN atau 2 persen GDP-nya. Sedangkan negara ASEAN lainnya paling sedikit mengerahkan 15 persen dari APBN-nya untuk pendidikan. Malaysia sejak menjadi bangsa merdeka tidak pernah kurang dari 20 persen APBN.

Segala kesalahan atau kelemahan dalam manajemen nasional ini telah menjadi penyebab distintegrasi bangsa di berbagai bidang. Oleh sebab itu untuk menciptakan kembali integrasi bangsa perlu ada perbaikan dalam manajemen nasional itu.

Membangun Kembali Integrasi Bangsa

Kelangsungan hidup Repu-

blik Indonesia amat dipengaruhi oleh kemampuan untuk membangun kembali integrasi bangsa. Kalau kita perhatikan dari uraian yang lalu bahwa banyak daerah merasa dikecewakan oleh pemerintah pusat, maka syarat pertama untuk membangun kembali integrasi bangsa adalah dibentuknya pemerintah pusat yang mendapat kepercayaan kuat dari rakyat di daerah. Karena pemerintah pusat sangat tergantung pada pimpinannya, maka dapat dikatakan bahwa diperlukan kepemimpinan nasional yang dapat merebut kepercayaan rakyat daerah.

Rakyat daerah harus dikembalikan keyakinannya bahwa segala janji yang dulu sudah diberikan oleh para penguasa dapat dipenuhi secepat mungkin. Kalau ada janji yang sebenarnya kurang masuk akal maka hal itu harus dirundingkan kembali. Akan tetapi perundingan baru dapat dilakukan setelah janji-janji lainnya dipenuhi sehingga sudah tumbuh kembali kepercayaan daerah bahwa pimpinan di pusat memang serius dalam perhatiannya untuk peningkatan kesejahteraan daerah.

Kemudian harus ada realisasi kongkrit dari desentralisasi dan otonomi daerah. Hingga sekarang kebanyakan orang daerah menganggap bahwa pu-

sat tidak serius dalam pelaksanaan otonomi daerah itu. Selalu ada ucapan orang pusat bahwa otonomi daerah hanya makin merugikan bangsa Indonesia. Katanya KKN akan berpindah tempat dari pusat ke daerah. Daerah tidak mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan berbagai kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Akan terjadi persaingan antar-daerah yang sangat mengganggu perkembangan, kalau berakibat daerah tidak mau mengharmonisasikan kepentingan yang berimpitan antara dua daerah. Timbul pandangan sempit yang mengakibatkan fanatisme daerah seperti tidak mau mengerjakan orang dari daerah lain. Demikianlah antara lain ucapan dari orang pusat yang tidak mau secara cepat melaksanakan otonomi daerah.

Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan nasional yang teguh dan dapat menjalankan manajemen nasional yang efektif. Hal yang penting adalah kemampuan mengendalikan birokrasi pemerintahannya agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan cepat. Hal-hal yang disebutkan itu memang dapat saja terjadi dalam otonomi daerah itu. Akan tetapi itu adalah biaya sosial yang harus kita keluarkan untuk pengembangan daerah secara mandiri. Secara langkah

demis langkah dapat dihilangkan dalam perkembangan daerah. Bukankah hal itu banyak persamaannya dengan perkembangan Indonesia ketika baru merdeka?

Kepemimpinan nasional harus dapat melakukan perbaikan ekonomi secepat mungkin. Kita telah banyak membuang waktu selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang kurang berhasil melakukan rehabilitasi ekonomi nasional. Sebaliknya malahan lebih merusaknya, hal mana dibuktikan oleh makin menurunnya nilai rupiah terhadap US dollar dan makin kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Itu semua disebabkan oleh pemerintah tidak mampu menimbulkan kepercayaan, malahan sebaliknya makin menimbulkan kebingungan akibat berbagai ucapan presiden sendiri yang amat kontroversial.

Sebab itu kepemimpinan nasional harus menunjukkan tekad keras untuk memperbaiki ekonomi. Tekad itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya, sehingga baik ekonomi makro maupun mikro dapat berkembang secara mantap. Di satu pihak diperlukan kondisi nasional yang kondusif untuk investasi modal asing dalam jumlah besar dan itu hanya mungkin terjadi

kalau ekonomi makro dinilai sehat. Dengan jalan itu dapat ditumbuhkan kemungkinan penyediaan lapangan kerja bagi jutaan orang yang sekarang banyak menganggur. Akan tetapi itu saja tidak cukup, juga diperlukan perkembangan ekonomi mikro yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi rakyat pada umumnya. Selain hal itu mengurangi pengangguran, akan meningkatkan pula penghasilan rakyat dan karena itu juga kepercayaan pada masa depan Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka pemerintah daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan investasi di daerahnya. Dengan begitu daerah dapat memperoleh bagian yang wajar dari hasil pembangunan. Perkembangan ekonomi mikro juga memungkinkan daerah dan rakyatnya ikut menikmati perkembangan ekonomi. Dengan begitu ia tidak merasa tertinggal atau dipinggirkan.

Perkembangan yang sehat dalam bidang ekonomi akan berdampak pada banyak masalah disintegrasi. Yang jelas adalah bahwa animositas penduduk pribumi dan nonpribumi akan sangat berkurang apabila ekonomi rakyat pribumi makin baik. Juga konflik antar-etnik yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, seperti Dayak-Madura, Maluku-Bugis-Buton, akan lebih mereda.

Bahkan akan ada dampak terhadap konflik umat beragama, karena sekarang pertentangan Islam-Kristen tidak lepas dari faktor ekonomi. Sebab kebanyakan penduduk nonpri yang kuat ekonominya beragama Kristen atau Katolik.

Langkah lain yang perlu diperhatikan adalah perbaikan dan peningkatan pendidikan nasional. Pemerintah harus bersedia mengeluarkan jauh lebih banyak anggaran untuk pendidikan agar makin banyak anak dapat menempuh pendidikan yang bermutu. Karena dengan otonomi daerah bagian terbesar dari penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab daerah, maka juga pimpinan daerah harus bersedia memberikan perhatian besar kepada pendidikan. Setiap daerah harus ditimbulkan kesadarannya bahwa kemajuannya sangat tergantung dari mutu manusia yang ada di daerah itu, dan itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang makin meluas dan bermutu. Sedangkan hal demikian tidak mungkin tanpa biaya yang memadai. Apabila ada pendekatan yang tepat dari pemerintah pusat maka justru manajemen pendidikan dapat dimanfaatkan untuk makin menimbulkan kesadaran dan perasaan bersatu antara seluruh daerah dan antara daerah dengan pusat.

Kemudian harus ada usaha yang terarah untuk makin menghilangkan kontroversi antara umat beragama dengan penyelenggaraan pendidikan di semua lingkungan agama secara mendalam. Pasti masih saja ada kalangan yang bersikap ekstrim sempit dan emosional. Akan tetapi jumlahnya akan makin berkurang sehingga tidak berdampak secara luas.

Yang kemudian sangat penting adalah kemampuan untuk menegakkan kekuasaan hukum. Semua perkara yang melanggar hukum, termasuk perbuatan korupsi dan penggunaan kekerasan, harus dapat ditangani secara cepat dan tegas. Maka kalau masih ada kalangan agama atau golongan politik yang bersikap ekstrim dan menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya atau melanggar persetujuan yang telah dibuat, masalahnya harus ditangani sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu diperlukan kekompakan antara setiap pemerintah daerah, Polri dan TNI untuk bertindak secara cepat dan tegas apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Hal ini memerlukan kemampuan Polri yang benar-benar efektif untuk dapat mengatasi pelanggaran hukum dengan penggunaan kekerasan, khususnya masalah keamanan di Aceh,

Maluku, Sulawesi Tengah dan Kalimantan, dan ada pengaturan yang tepat agar TNI dapat cepat membantu Polri untuk menyelesaikan masalah keamanan, apabila Polri sendiri kewalahan.

Ini semua harus disertai perbaikan ekonomi rakyat kecil sehingga di lingkungan *grassroot* umat beragama tidak lagi ada sentimen negatif terhadap umat lain disebabkan iri hati karena faktor ekonomi.

Perkembangan demokrasi Indonesia harus dapat menghasilkan kepemimpinan nasional yang mampu menyelenggarakan manajemen nasional ini. Pengalaman kita dengan pemilihan Presiden Abdurrahman Wahid belum menghasilkan kepemimpinan yang dapat menjalankan manajemen nasional secara efektif. Hendaknya ini menjadi pelajaran berharga untuk pemilihan yang akan datang. Sebab bagaimana pun kita tidak dapat meninggalkan demokrasi dan seluruh prosedur yang bersangkutan dengan itu, apabila kita ingin menjamin integrasi bangsa.

Sebab yang kemudian harus terwujud adalah masyarakat Indonesia yang merealisasikan Pancasila. Hanya dengan Pancasila integrasi bangsa dapat terlaksana dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu de-

mokrasi harus tegak dan berjalan makin baik, karena demokrasi merupakan satu nilai yang dikehendaki Pancasila. Akan tetapi juga manajemen nasional harus mewujudkan kehidupan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, selalu mengejar persatuan Indonesia dan menda-tangkan keadilan sosial bagi se-luruh rakyat Indonesia, dan itu semua tidak boleh lepas dari moralitas yang tinggi yang dilan-dasi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inilah tantangan bagi kepe-mimpinan nasional yang ingin berhasil membangun kembali Integrasi Bangsa Indonesia yang sekarang sedang terkoyak-koyak.

Penutup

Memang bangsa Indonesia sedang dalam situasi yang amat parah yang belum pernah di-alami sebelumnya. Di bidang ekonomi bangsa kita sekarang amat menderita sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Di bidang politik pun kita se-

dang menghadapi berbagai keru-wetan. Dan hal yang paling parah serta paling mengancam eksistensi Republik Indonesia adalah terjadinya disintegrasi bangsa di berbagai bidang.

Oleh sebab itu untuk men-jamin eksistensi Republik Indo-nesia sampai ke akhir zaman harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk membangun kembali integrasi bangsa. Na-mun untuk itu diperlukan ke-pemimpinan nasional yang da-pat merebut kepercayaan ma-syarakat dan mempengaruhi se-luruh kepemimpinan bangsa di berbagai tingkat dan lapisan. Se-lain itu kepemimpinan nasional itu harus dapat menyelenggara-kan manajemen nasional yang efektif di segala bidang. Pada waktu ini sayang sekali syarat ini belum dapat dipenuhi.

Semoga di masa depan bang-sa Indonesia mendapat kemu-rahan dan ridho Allah dan sece-pat mungkin dapat terwujud kepemimpinan nasional yang kita perlukan.